



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan yang selanjutnya disebut UPT Pengamat Pengairan adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pengamat Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengamat Pengairan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPT Pengamat Pengairan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan pengairan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Pengamat Pengairan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Pengamat Pengairan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengamat Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Pengamat Pengairan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan irigasi dan pengairan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan saluran tersier;
- d. melaksanakan pengawasan prasarana dan sarana besar serta pengembangannya;
- e. mengatur pendistribusian air kepada petani pemakai air;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi pengairan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Pengamat Pengairan mempunyai fungsi pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan irigasi di Daerah.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pengelolaan pengairan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan rencana kegiatan Pengamat Pengairan agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan sebagai bahan pembuatan sasaran kinerja pegawai;
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Pengamat Pengairan;
- f. menyusun rencana tata tanam detail sesuai usulan perkumpulan petani pemakai air;
- g. menetapkan besarnya kebutuhan air/pemberian air (faktor-K) pada tiap bangunan pengatur air jika debit air sungai mengalami penurunan;
- h. memberikan pembinaan kepada petani pemakai air untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasional;
- i. membantu proses pengajuan biaya operasional yang diajukan oleh petani pemakai air;
- j. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengamat Pengairan sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Pengamat Pengairan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan

- pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sub bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan, dan pendistribusian;
 - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana prasarana kantor;
 - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
 - j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
 - k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
 - l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
 - n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
 - o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
 - p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Pengamat Pengairan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengamat Pengairan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Pengamat Pengairan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengamat Pengairan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengamat Pengairan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Pengamat Pengairan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. dalam hal belum ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hak keuangan pegawai tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



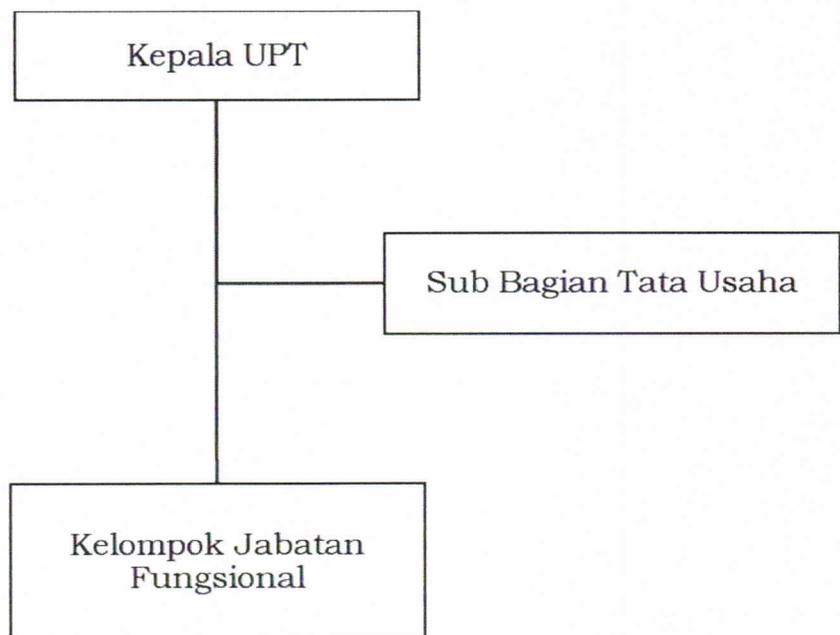
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

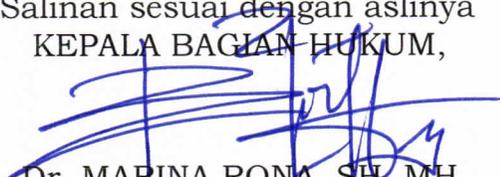
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT
PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002